

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu wilayah yang berbatasan dengan kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah penopang perekonomian di provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang strategis di kawasan **GERBANG KERTASUSILA** merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan di Jawa Timur yang mempunyai beberapa faktor pendukung diantaranya infrastruktur dan utilitas yang baik (jalan, bandara, terminal, telekomunikasi, dan sebagainya), serta sebagai kota industri, perdagangan dan jasa yang didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

1. Geografi

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong dan sungai Surabaya, sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5'– 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah Timur adalah Selat Madura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sedang di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa

perkotaan (*urban area*). Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Jabon mempunyai wilayah yang paling luas, yaitu 62 Km² sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu 941 jiwa/Km², sedang jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Taman yang sama-sama memiliki 24 desa/kelurahan. Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar 20-35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 63.800,00 Ha dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu : 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82% ; 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25.889 Ha atau 36,24% ; 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%. Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin seluas 163,13 Km² dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang,

zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.¹

2. Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.053.467 jiwa, sedangkan tahun 2011 sejumlah 1.984.635 jiwa.² Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 223.697 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7,963 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 58.562 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 941 jiwa/Km².

Satuan Wilayah Gerbangkertosusila termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan dalam RTRW Propinsi Jawa Timur. Wilayah yang masuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila adalah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Pusat dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) ini adalah kota Surabaya yang juga sebagai ibukota propinsi Jawa Timur. Sampai pada tahun 2005, tidak ada deviasi dari pusat SWP ini. Hal ini dibuktikan dengan tingginya populasi kota Surabaya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang tergabung dalam SWP Gerbangkertosusila. Pada tahun 2005, populasi penduduk di kota Surabaya yaitu 5.622.259 (Indonesia.go.id). Tingginya polulasi menunjukkan bahwa

¹ Dikutip dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun 2012 pada tanggal 15/10/2013 pukul 11.42

² *Ibid.*,

migrasi penduduk yang besar ke kota Surabaya, karena kota Surabaya masih mempunyai daya tarik bagi penduduk yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi. Daya tarik tersebut berupa pembangunan industri dan sektor sekunder dalam bidang perdagangan, serta fasilitas lain yang mendukung kegiatan tersebut.

Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang langsung berbatasan dengan kota Surabaya dan sebagai wilayah bagian dari Gerbangkertosusila, telah mendapatkan efek dari kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan, antara lain pelimpahan pembangunan kantor lembaga propinsi seperti Kantor Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, pembangunan Terminal Bungurasih sebagai akses masuk ke kota Surabaya, pembangunan Bandara Juanda baru, dan perkembangan pembangunan kawasan industri. Efek tersebut dalam teori pengembangan wilayah disebut sebagai Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole theory*).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan kawasan industri Siborian (Sidoarjo, Jabon , Krian). Sesuai dengan namanya, kawasan industri Siborian terletak pada tiga kecamatan di kabupaten Sidoarjo, yaitu kecamatan Sidoarjo, kecamatan Jabon dan Kecamatan Krian. Masing-masing dari ketiga tempat tersebut mempunyai kelebihan yaitu:

1. Kecamatan Sidoarjo

Kawasan yang akan digunakan sebagai kawasan industri adalah daerah sepanjang jalan lingkar timur Sidoarjo yang juga merupakan jalan alternatif bebas hambatan yang dipersiapkan secara khusus untuk lalu

lintas industri dan perdagangan. Hingga saat ini, jalan lingkaran timur yang telah terbangun adalah sepanjang 11 kilometer dengan lebar badan jalan 60 meter (sudah terealisasi 80%). Kecamatan Sidoarjo yang juga menjadi pusat administratif dari kabupaten Sidoarjo, maka jenis industri yang cocok untuk dikembangkan pada kawasan tersebut ialah industri jasa dan perdagangan, perkantoran, perhotelan, hiburan, pertokoan, perbankan dan pemukiman/perumahan, industri manufaktur dan pabrikasi. Industri manufaktur dan pabrikasi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya karena luas lahan yang disediakan berdasarkan RTRW untuk kawasan industri di kecamatan Sidoarjo ini hanyalah 42.021 Ha. Dalam kondisi eksisting struktur wilayah RTRW 2003/2004, kecamatan Sidoarjo merupakan pusat perkembangan dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dan tidak terjadi deviasi, artinya perkembangan tetap terpusat dengan baik pada kecamatan Sidoarjo dan memberikan dampak yang baik pula pada wilayah bagian dari SWP II. Kawasan industri kecamatan Sidoarjo diharapkan mempunyai keterkaitan dengan kawasan industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Kawasan industri kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan efek dan mendukung kegiatan industri pada daerah-daerah disekitarnya seperti kecamatan Candi, kecamatan Buduran, kecamatan Gedangan, kecamatan Waru, dan kecamatan Sedati.

2. Kecamatan Jabon

Dalam struktur wilayah, kecamatan Jabon bukan merupakan pusat dari perkembangan SWP. Kecamatan Jabon masuk dalam SWP III yang berpusat di kecamatan Porong, sampai pada tahun 2004 tidak terjadi penyimpangan, namun setelah terjadi bencana semburan lumpur, maka akan lebih baik jika kecamatan Porong tidak lagi dijadikan pusat perkembangan karena telah mengalami kerusakan fisik, sehingga kurang efektif untuk pusat pengembangan SWP III. Kecamatan Jabon merupakan lokasi yang strategis untuk pengembangan kawasan industri karena lahan yang tersedia masih cukup banyak. Pemerintah mengalokasikan lahan seluas 2683,916 Ha, luas lahan yang diperuntukkan untuk kawasan industri ini terbesar di kabupaten Sidoarjo. Dengan luas lahan tersebut, kecamatan Jabon akan diarahkan untuk industri pabrikasi dan manufaktur besar yang nantinya diharapkan dapat disejajarkan dengan kawasan industri besar lainnya yang terdapat di Jawa Timur. Hal ini bukan merupakan hal yang “muluk”, mengingat lokasinya yang mendukung dan dekat dengan kawasan industri NIP (Ngoro Industrial Park)-Mojokerto, Kedekatan dengan kawasan industri lain yang juga tergabung dalam SWP Gerbangkertosusila diharapkan dapat memberikan hubungan keterkaitan dan saling menguntungkan.

Kawasan industri Jabon diharapkan dapat mendukung kegiatan industri yang telah ada di wilayah sekitarnya misalnya intako (industri tas dan koper) di kecamatan Tanggulangin, serta dapat menjadi tempat baru bagi perusahaan yang telah tenggelam karena luberan lumpur Lapindo.

Pemda kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa sekitar 15.000 pelaku ekonomi mulai dari usaha kecil hingga besar lumpuh karena bencana semburan Lumpur Lapindo. Kawasan industri ini akan mendukung pertumbuhan wilayah yang ada di sekitarnya dengan adanya lapangan pekerjaan baru, misalnya kecamatan Krembung dan Tulangan yang selama ini industrinya belum berkembang.

3. Kecamatan Krian

Kecamatan Krian menjadi posisi yang strategis karena By Pass krian merupakan jalan nasional yang menghubungkan Surabaya-Mojokerto-Jombang-Madiun-Ngawi-Solo-Jogja. Kawasan yang strategis untuk investasi industri adalah kawasan di sekitar By Pass Krian. Dengan melihat posisi yang strategis tersebut, maka arahan kegiatan yang tepat untuk kawasan ini adalah perdagangan, perkantoran, perhotelan, pertokoan, perumahan dan pemukiman, perbankan serta industri manufaktur atau pabrikasi. Kawasan industri ini diharapkan akan merangsang pertumbuhan ekonomi di kecamatan sekitarnya yaitu kecamatan Prambon, Krembung, Tarik, Balongbendo, Wonoayu, Taman dan Sukodono. Luas lahan yang disediakan untuk kawasan industry Krian adalah 883,925 Ha. Dalam struktur wilayah, kecamatan Krian merupakan SWP V, dan dalam perkembangannya tidak mengalami penyimpangan pusat pertumbuhan.

Kawasan industri yang berada di By Pass Krian ini mempunyai jarak yang amat dekat dengan kawasan industri yang terletak di kecamatan

Wringinanom dan kecamatan Driyorejo-kabupaten Gresik. Dalam kawasan industri ini juga terdapat beberapa industri besar seperti Perusahaan Wings Group, Perusahaan Garuda Food, Perusahaan Wimcycle, dan usaha kecil lainnya yang dapat menyumbangkan bahan produksi untuk kawasan industri Krian.

Pengembangan dari ketiga kawasan industri tersebut dapat meminimalisir permasalahan industri yang ada di kabupaten Sidoarjo yaitu sulitnya penanganan limbah karena lokasi industri yang menyebar, dengan lokasi industri yang menyebar akan memudahkan untuk perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) secara bersama sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

Pengembangan dari kawasan industri Siborian ini apabila dianalisis merupakan pengembangan kawasan industri berdasarkan teori Kutub pertumbuhan (*Growth Pole Theory*), sama halnya dengan pengembangan SWP Gerbangkertosusila. Teori ini berdasar pada industri dengan sasaran pengembangan industri berbahan baku dari daerah lain sehingga pertumbuhan industri macam ini selain mendorong ekonomi lokasi industri, juga mampu meneteskan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain. Proses pengembangan lokasi industri (*propulsive industry*) merupakan kutub pertumbuhan (*Growth Pole*).

3. Ekonomi

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing di pasaran, baik karena ciri-cirinya yang khas, kualitasnya, maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuhkembangkan.

Bentuk nyata usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menggali potensi unggulan adalah dengan dicanangkannya beberapa sentra usaha antara lain : Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung, Kampoeng Krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, Olahan ikan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Sentra tas dan koper di Desa Kedensari dan Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan bordir di Desa Ketegan, Desa Boro dan Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru.

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai sektor antara lain :

(1) Pertanian

Potensi unggulan disektor pertanian tahun 2012 meliputi berbagai komoditas yang patut dijadikan unggulan karena mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, produksi komoditas tersebut

terdiri dari padi, jagung, kacang hijau, kedelai, tebu serta masih banyak komoditi yang lain.

Produktivitas tebu pada tahun 2012 sebesar 836,40 kw/Ha, bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 852,25 kw/Ha terjadi penurunan, hal ini disebabkan komposisi varietas masak awal, tengah dan akhir yang tidak sesuai dengan jadwal tebang. Sehubungan dengan hal tersebut berakibat pula terhadap penurunan produktivitas tebu. Selanjutnya untuk komoditas sayuran dataran rendah juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara komersial, mengingat Sidoarjo berdekatan dengan kota Surabaya sebagai tempat pemasaran hasil sayuran dataran rendah. Selain itu perlu dikembangkan sayur organik untuk memenuhi kebutuhan swalayan atau supermarket di Sidoarjo maupun di sekitar Sidoarjo.

(2) Perikanan

Pada sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo mengandalkan udang dan bandeng sebagai komoditas unggulan yang dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Dengan luas tambak 15.530.409 Ha memberikan kesejahteraan bagi 3.277 petani tambak dan 3.281 pendega, yaitu orang yang berusaha secara bagi hasil dengan pemilik tambak. Wilayah tambak di Sidoarjo membentang dari Utara ke Selatan sepanjang pantai Timur, dimulai dari Kecamatan Waru sampai Kecamatan Jabon.

(3) Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 47,80% pada tahun 2012. Pada sektor industri pengolahan, potensi terbesar adalah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini terbukti tahan dari terpaan krisis.

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan berdasarkan yang wajib lapor

KLUI	BESAR	MENENGAH	KECIL	TOTAL
0	46	33	206	285
1	3	4	10	17
2				0
3	376	261	624	1.261
4	7	1	12	20
5	6	4	5	15
6	45	63	404	512
7	9	10	32	51
8	25	22	135	182
9	25	19	173	217
JUMLAH	542	417	1.601	2.560

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2014

Keterangan:

- KLUI : Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
- 0 : Kegiatan yang belum jelas batasannya
- 1 : Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, perikanan
- 2 : Pertambangan, dan penggalan
- 3 : Industri Pengolahan
- 4 : Listrik, gas dan air
- 5 : Bangunan
- 6 : Perdagangan besar, seceran, dan rumah makan serta hotel
- 7 : Angkutan, Penggudangan, dan komunikasi
- 8 : Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan

9 : Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

Apabila dikelompokkan jumlah usaha berskala UKM di Sidoarjo sebanyak 2.018 unit, sedangkan UMB sebanyak 542 unit. Ini berarti Usaha Mikro dan Kecil jumlahnya mencapai 75% dari total usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

(4) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini berkaitan dengan sektor yang lain yaitu sektor industri pengolahan, dan pada tahun 2012 sektor perdagangan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 sebesar 27,33% meningkat pada tahun 2012 sebesar 28,17% atau mengalami kenaikan sebesar 0,84%.

a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan. PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga tidak terlalu akurat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu digunakan PDRB ADHK yang telah menghilangkan inflasi sehingga bisa diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil. Sedangkan untuk tingkat kemakmuran digunakan indikator PDRB Perkapita.

b.PDRB Perkapita

PDRB tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor

perdagangan. Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membenahi infrastruktur. Diharapkan dengan adanya pembenahan jalan-jalan alternatif dapat melancarkan transportasi yang akhirnya dapat menaikkan daya tarik Sidoarjo di mata investor.

c. Investasi

Investasi memiliki peranan penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama menghasilkan output yang efisien. Perkembangan Investasi Swasta di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Investasi Swasta Di Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Usaha	2011		2012	
		Juml. Unit / Usaha	Nilai Investasi	Juml. Unit / Usaha	Nilai Investasi
1	Industri Pengolahan	147,00	188.455.571.208,00	185	2.880.047.323.041,00
2	Jasa	123,00	5.339.243.552.093,00	112	1.632.297.245.481,00
3	Perdagangan	3,497	3.082.673.012.706,00	3.289	9.912.169.052.705,00
4	Perumahan	4,746	425.054.781.620,00	5.499	1.043.769.397.661,00
5	Pertambangan	-	-	-	-
6	Pariwisata	78,00	44.957.000.000,00	71	55.776.750.600,00
7	Pertanian	-	-	-	-
8	Perikanan	2,00	8.000.000.000,00	4	9.700.000.000,00
9	Kesehatan	220,00	220.986.000.000,00	148	135.947.000.000,00
10	Koperasi	-	-	43	8.495.000.000,00
11	Lain-lain	18,00	7.700.000.000,00	-	-

Jumlah	8,831	9.317.069.917.627, 00	9.351	15.678.201.769.488,00
--------	-------	-----------------------	-------	-----------------------

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa, jika dibandingkan antara tahun 2011 dan tahun 2012 dari total nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan Pada tahun 2011 nilai investasi sebesar Rp. 9.317.069.917.627,00, dan pada pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp.15.678.201.769.488,00 atau naik 68,27%. Demikian pula dengan jumlah unit usahanya, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 8.831 unit (2010) menjadi 9.351 unit (2011) atau naik 5,89%.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan kualitas hidup ini merupakan hasil akhir yang diharapkan dari perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Indeks ini merupakan standar yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 tercapai sebesar 77,03. Berdasarkan capaian tersebut Kabupaten Sidoarjo status pembangunan manusianya termasuk kategori menengah atas. IPM Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan IPM ini

menunjukkan, bahwa arah pembangunan daerah selama lima tahun terakhir telah beradapada jalur yang tepat dimana hasil akhirnya mampu meningkatkan kualitas masyarakat.

Untuk menilai perkembangan IPM ini akan disajikan perkembangan masing-masing indeks yang terkait. Pengukuran IPM ini dilakukan secara komprehensif. Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh masyarakat menggunakan Indeks kesehatan. Indeks ini diukur berdasarkan capaian usia harapan hidup masyarakat.

Usia harapan hidup masyarakat merupakan ukuran untuk menilai umur maksimal rata-rata masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan tolok ukur ini diasumsikan, bahwa semakin tinggi usia harapan hidup suatu wilayah, semakin baik pula pemenuhan pelayanan kesehatannya. Usia harapan hidup masyarakat Sidoarjo tahun 2011 sebesar 70,70 tahun. Angka ini meningkat dari capaian pada tahun 2011 yang usia harapan hidupnya sebesar 70,74 tahun. Secara umum usia harapan hidup ini masih cukup stabil, hal ini menunjukkan, bahwa program pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik. Pada masa yang akan datang masih diperlukan kerja keras dari seluruh aparat khususnya dalam bidang kesehatan dan dapat diupayakan adanya kenaikan usia harapan hidup mengingat masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh UNDP sebesar 85 tahun.

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan dilakukan dengan mengukur indeks pendidikan. Indeks ini diukur melalui dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk.

Angka melek huruf dihitung berdasarkan persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis. Pada tahun 2012, angka melek huruf di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 97,96% sedikit lebih tinggi dibanding angka melek huruf tahun 2011 yang sebesar 97,13%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan angka melek huruf ini. Dengan demikian upaya penanganan masalah ini hanya tinggal difokuskan pada penduduk usia diatas 44 tahun.

Peningkatan indeks pendidikan ini mengindikasikan telah berjalannya program pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Program tersebut diutamakan pada upaya untuk memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan baik melalui sekolah maupun luar sekolah. Sedangkan untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat, dilakukan dengan mengukur kemampuan daya beli (paritas daya beli) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. **Paritas daya beli masyarakat**, dihitung dari Angka kemampuan daya beli masyarakat. Nilai paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sidoarjo tiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat ditinjau dari kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan hidupnya mengalami peningkatan.

Dengan adanya perhitungan IPM yang setiap tahunnya selalu meningkat, maka mengindikasikan, bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo di bidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

B. Gambaran Umum Peraturan Gubernur No. 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013

Peraturan Gubernur no 72 tahun 2012 ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Karena dalam peraturan gubernur ini berisi tentang upah minimum kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2013. Yang dalam penelitian ini yaitu kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah cukup berpotensi dalam menopang perindustrian di Jawa Timur, sehingga di kabupaten Sidoarjo mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah. Upah minimum kabupaten Sidoarjo yang mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu Rp1.250.000,00 menjadi Rp1.720.000,00 di tahun 2013. Kenaikan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam menetapkan peraturan gubernur ini pemerintah mempertimbangkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota dan dewan pengupahan provinsi Jawa Timur. Serta untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, serta produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal), dan perkiraan inflansi Tahun 2013 perlu menetapkan Upah

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Dasar yang digunakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berbagai revisinya; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN2000; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN.2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/607/KTPS/013/2012.

Peraturan ini menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013 pada pasal (1). Pada pasal (2) ayat (1) membahas besaran Upah Minimum kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan ayat (2) menjelaskan bahwa Upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerjakurang dari 1 (satu) tahun. Pasal (3) ayat (1) dan (2) berisi bahwa Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pasal 4 berisi Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 pada pasal (5), agar semua instansi atau perusahaan yang terkait dengan peraturan ini menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

C. Dinamika Serikat Buruh di Kabupaten Sidoarjo

Gerakan serikat buruh selalu mewarnai kehidupan politik di Indonesia dari masa ke masa. Dari pra kemerdekaan hingga saat reformasi tahun 1998, kekuatan buruh ini selalu menjadi bagian terpenting dalam sejarah gerakan masyarakat sipil. Sayangnya, pada masa orde baru gerakan serikat buruh yang memang memiliki watak politik benar-benar dikooptasi dengan konsep Negara organik yang cenderung otoriter oleh Soeharto. Satu kenyataan adanya disorganisasi sistematis dan marginalisasi kekuatan serikat buruh di bawah rezim Soeharto. Reformasi tahun 1998, salah satu momentum bagi serikat buruh untuk bangkit dari keterpurukan selama tiga dekade terbelenggu oleh kebijakan Negara. Munculnya berbagai macam organisasi serikat buruh pasca reformasi, menjadi signal awal akan kekuatan buruh untuk mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Sejarah serikat buruh yang sejak awal memiliki watak politik, diharapkan dengan

kebebasan politik saat ini, buruh mampu bermain dalam politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya.

Pasca orde baru, bentuk strategi gerakan serikat buruh khususnya di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya lebih independen dan tidak memiliki keterkaitan politik secara langsung dengan partai politik. Serikat buruh di dalam strategi gerakannya lebih mengutamakan konsolidasi antar serikat buruh yang berada di Sidoarjo. Gerakan serikat buruh di Sidoarjo ini lebih condong untuk bergerak sendiri tanpa merangkul partai politik dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya. Adakalanya serikat buruh bekerja sama dengan partai politik, seperti pada pemilu 1999 dan pemilu 2004. Tetapi kerja sama tersebut lebih bersifat pragmatis atau untuk kepentingan sesaat yang lebih mengutamakan partai politik dari pada buruh umumnya.

Praktek hubungan gerakan buruh dengan partai politik yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi relatif cair. Hal ini disebabkan oleh kenyataan hadirnya begitu banyak partai politik namun tanpa perbedaan ideologi yang signifikan. Di dukung pula oleh sifat gerakan buruh sendiri yang tidak memiliki ideologi politik tertentu, hal ini menyebabkan hubungan diantara keduanya relatif cair dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Bentuk gerakan buruh saat ini lebih bersifat terfragmentasi berdasarkan komunitas dan kepentingannya. Keluarnya UU No. 21 Tahun 2000, memberikan kebebasan terhadap buruh untuk membentuk serikat buruh. Sehingga muncul berbagai macam bentuk serikat-serikat buruh. Mereka lebih terkotak-kotak, dan ada perbedaan dalam hal segi gerakan antara serikat buruh independen dengan

SPSI. Di Sidoarjo khususnya, demonstrasi yang lebih menjurus radikal tidak mengikutsertakan SPSI di dalam aksinya. Serikat buruh independen ini cenderung berafiliasi dengan serikat buruh yang lain tanpa SPSI.

Dalam hal strategi gerakan buruh yang terjadi di Sidoarjo adalah disesuaikan dengan kondisi. Bentuk dari strategi gerakan bersama dapat berupa aliansi dengan berbagai macam serikat-serikat buruh untuk menyikapi isu-isu normatif. Pilihan strategi gerakan ini, terkadang dilakukan diluar sistem dan juga didalam sistem. Umumnya gerakan aksi buruh yang dilakukan di luar sistem berkaitan dengan demonstrasi menuntut hak-haknya atau yang bersifat normatif. Gerakan ini lebih bersifat reaktif, karena kebijakan perusahaan yang merugikan buruh. Aksi buruh yang dilakukan didalam sistem, mengenai penentuan besaran UMK. Gerakan serikat buruh di Sidoarjo lebih condong bergerak sendiri tanpa merangkul partai politik. Serikat-serikat buruh lebih yakin akan perjuangan yang dilakukan dengan kekuatan sendiri. Aksi-aksi yang dilakukan gabungan aliansi buruh di Sidoarjo, tidak ikut menyertakan SPSI. Gerakan demonstrasi buruh independen ini lebih radikal dibandingkan dengan SPSI.

D. Dinamika Perusahaan di kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo merupakan salah satu daerah penopang perindustrian di Jawa Timur. Banyak investor yang membuka usaha di wilayah ini baik perusahaan besar maupun kecil. Selain itu Sidoarjo merupakan wilayah yang strategis, berbatasan dengan ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya yang merupakan kota terbesar ke 2 setelah Jakarta. Kondisi ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha untuk membuka usaha di Sidoarjo.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sejak tiga tahun terakhir terus merangkak naik seiring banyaknya investor yang menanamkan modal. Tahun 2013 Pemkab Sidoarjo menarget angka investasi sebesar Rp 16 triliun seiring perkembangan industri, perumahan dan perdagangan jasa.

Kenaikan iklim investasi tumbuh subur di Sidoarjo tidak luput dari kepercayaan investor pascasemburan lumpur di Porong. Apalagi Pemkab Sidoarjo menerapkan perizinan satu atap sehingga investor tidak bertele-tele untuk mengurus izin yang dibutuhkan investor. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo yang menangani segala perizinan di Sidoarjo dari tahun ke tahun terus melonjak.

Untuk tahun 2010 jumlah izin yang dikeluarkan mencapai 12.865, tahun 2011 izin yang dikeluarkan melonjak hingga mencapai 13.573 dan 2012 naik menjadi 13.680. Sementara untuk tahun 2013 diperkirakan masih naik karena investor masih ingin mengembangkan sayapnya di Sidoarjo.³

Banyaknya investor yang masuk secara otomatis mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pasalnya, lapangan pekerjaan terbuka terutama bagi penduduk setempat menjadi karyawan untuk bekerja sehingga warga yang semula menganggur bisa mendapat pekerjaan.

Investor yang ada ini juga mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Tahun 2010 angka yang tercatat mencapai Rp 310,3 miliar, tahun 2011 naik menjadi Rp 427,07 miliar dan tahun 2012 naik drastis menjadi Rp 643 miliar.

³ Surya Online edisi Kamis 7 November 2013, diakses pada tanggal 23 Desember 2013 pada pukul 14.45

Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo sejak dijabat Bupati H Saiful Ilah berpasangan dengan HMG Hadi Sutjipto (SUCI) selama sejak tiga tahun terakhir juga ikut naik. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi 5,62 persen, 2011 naik menjadi 6,38 persen dan tahun 2012 menjadi 7,08 persen. Pendapatan per kapita pun pada 2012 naik menjadi 13,4 juta dan pada 2011 hanya Rp 12,4 juta.⁴

Perkembangan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tajam. Data dari disertasi tahun 2003 oleh I Nyoman Adika (mahasiswa Universitas Gadjah Mada) menyebutkan bahwa pada tahun 1990 terdapat 1.334 unit perusahaan dari berbagai jenis industri, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 4.079 unit. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa pada tahun 2007, jumlah industri yang ada di kabupaten Sidoarjo ialah 5.638 unit dengan kategori 487 unit industri besar dan 5151 unit industri kecil. Jadi, dalam kurun waktu 7 tahun (2000-2007), telah terjadi peningkatan jumlah industri sebesar 1.559 unit atau terjadi penambahan rata-rata jumlah industri 519 unit pertahun. Peningkatan jumlah industri yang cukup tajam memang didukung dengan keadaan topografi kabupaten Sidoarjo yang datar dan aksesibilitas yang baik. Jumlah industri yang meningkat di kabupaten Sidoarjo diikuti dengan jumlah migran risen yang cukup banyak datang ke kabupaten Sidoarjo. Migran risen adalah penduduk yang datang ke kabupaten Sidoarjo dengan tujuan tidak untuk menetap, misalnya mereka datang ke kabupaten Sidoarjo hanya untuk bekerja (pagi berangkat dan sore sudah kembali). Berdasarkan data BPS 1995-2000

⁴ *Ibid.*

didapat migran risen sebesar 111.409 orang dan dari sejumlah ini sebesar 35.859 orang (32,29 persen) berasal dari Kota Surabaya dan yang lain berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah migran tersebut pada saat jumlah industri di kabupaten Sidoarjo masih mencapai 4.079 unit dan pada tahun 2007 telah mencapai 5.638 unit, maka jumlah migran risen akan bertambah seiring dengan penambahan lapangan pekerjaan baru. Kabupaten Sidoarjo masih menjadi pilihan bagi migran risen untuk memulai usahanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh I Nyoman Adika mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa banyak tenaga kerja sektor informal (75,5 persen dari 71 orang responden) dalam jangka panjang ingin membangun usaha yang mapan dan permanen pada kota yang lebih besar. Mereka memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat usaha karena di daerah ini persaingannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa. Sidoarjo digunakan sebagai wilayah lompatan pertama untuk berusaha. Di Sidoarjo, mereka mencari pengalaman sambil mengumpulkan modal, dan kalau sudah mapan baru akan melompat ke kota yang lebih besar sebagai tempat lompatan kedua dan begitu seterusnya. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah migran risen, sehingga populasi penduduk kabupaten Sidoarjo menjadi terbesar kedua di wilayah Gerbangkertosusila setelah kota Surabaya. Memahami potensi yang ada di kabupaten Sidoarjo, dan sebagai bagian Satuan Wilayah Pembangunan dari Gerbangkertosusila, maka pemerintah kabupaten Sidoarjo membuat kebijakan untuk mengembangkan kabupaten Sidoarjo sebagai

wilayah industri, agar dapat mendukung pertumbuhan di wilayah Gerbangkertosusila.

Namun karena adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Mereka mengancam pemerintah akan mengeluarkan investasi mereka dari Sidoarjo apabila upah minimumnya naik hingga 30%. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah di kalangan buruh yang menginginkan taraf hidupnya meningkat, sementara pengusaha yang tidak mau membayarkan upah minimum kepada buruh sesuai dengan aturan yang dianggap memberatkan bagi pengusaha.

E. Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo

1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

a. Visi

“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya PMKS melalui usaha kesejahteraan sosial, serta terciptanya tenaga kerja yang berkualitas, tersedianya kesempatan kerja, hubungan industrial yang dinamis dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan” tahun 2015.

b. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM, dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
- c. Terciptanya tenaga kerja yang berkualitas.
- d. Mendorong peningkatan sarana hubungan industrial, persyaratan kerja, kualitas hubungan industrial secara cepat dan tepat guna memperbaiki kesejahteraan pekerja dan keluarganya menuju penghasilan yang layak serta terjaminnya penyelesaian perselisihan industrial.
- e. Terpenuhinya pelayanan penanggulangan korban bencana.
- f. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT).
- g. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum.

b. Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terdiri dari ;⁵

- a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Staf : Sekretariat, yang terdiri dari:

⁵ Perda kab Sidoarjo Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sidoarjo.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Bina Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - b) Seksi Bina Lembaga Sosial, dan
 - c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 2. Bidang Pelatihan, Lembaga Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a) Seksi Bina Lembaga Pelatihan
 - b) Seksi Pelatihan dan Produktivitas
 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Penempatan Kerja
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, dan
 - c) Seksi Transmigrasi
 4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja
 - b) Seksi Hubungan Industrial
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Norma Kerja

- b) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- c) Seksi Norma Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja.
- d. UPT Dinas, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di daerah yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan keputusan gubernur nomor 72 tahun 2012 tentang upah minimum kabupaten/kota, yang dalam penelitian ini khusus pada wilayah kabupaten Sidoarjo.

c. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang di dinas tenaga kerja dan sosial yang bertugas untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku terkait ketenagakerjaan seperti Peraturan Gubernur no 72 tahun 2012 yang mengatur tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam hal ini di kabupaten Sidoarjo yang memiliki Upah Minimum kabupaten sebesar Rp 1.720.000,00.

Pegawai pengawas ketenagakerjaan di kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya memberikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo yang berjumlah 2.542 perusahaan dibagi menjadi tim kerja. Pembagian tim kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
**Pembagian Wilayah tahun 2013 Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan
 Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo:**

1	WARU	1. M. Nuch, SH. ST. 2. Mat Khoirin, SH. ST. 3. Isnaibah, SKM	
2	TAMAN	1. Tri Widodo, SH. 2. Endang Yuniarsih, SE. 3. Mahaendra, ST.	
3	GEDANGAN/SEDATI	1. Hasan Mangalle, SH. ST. 2. M. Aris Setiawan, ST.	
4	SIDOARJO/PORONG/ TANGGUL ANGIN/JABON / SUKODONO	1. Ir. Moh Solikan 2. Terubus, S.Kep. Ns.,M.K3 3. Nureni Kenpurwastuti,ST.	
5	BUDURAN / CANDI	1. Maratul Husna, ST. 2. Drs. Sapta Andi Nugraha S.	
6	PRAMBON/BALONGBENDO /WONOAYU/TARIK/ KRIAN/KREMBUNG/ TULANGAN	1. Bambang Wijatmoko, SH. ST. 2. M. Hisyam, SE. 3. Budiono, ST.	

Ket: Pembagian Wilayah Berlaku Mulai Januari 2013 s/d Desember 2013